

ABSTRAK

Dalam jalannya eksekusi hak kreditor pemegang hak tanggungan selalu terdapat banyak permasalahan, terutama mengenai boedel pailit. Salah satunya adalah saat suatu perkara pidana bersinggungan dengan perkara kepailitan, akibatnya dilakukan sita pidana terhadap sita pailit secara umum. Padahal, boedel pailit sebelumnya telah dijamin dengan hak tanggungan kepada kreditor. Kemudian pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi terganggu terganggu karena penempatan sita pada objek yang sama oleh Polisi atau Kejaksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan menganalisis kedudukan hukum bagi kreditor hak tanggungan boedel pailit terhadap sita perkara pidana mendahului sita umum pailit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengklarifikasi dan memastikan kebenaran data sekunder serta sebagai pelengkap yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kreditor pemegang hak tanggungan lemah dengan arti belum mempunyai jaminan kepastian hukum saat eksekusi boedel pailit dengan sita perkara pidana, yang kemudian tidak akan ada pihak yang bisa mengeksekusi objek hak tanggungan sampai dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila objek hak tanggungan memenuhi kriteria pada Pasal 39 ayat (1) huruf a atau huruf e KUHAP, dengan ini kreditor pemegang hak tanggungan kehilangan hak eksekutorialnya serta berubah menjadi kreditor konkuren. Pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan pada perkara kepailitan sudah dilindungi oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, Hak Tanggungan, Kedudukan Hukum.

ABSTRACT

In the course of executing the rights of creditors holding mortgage rights, there are always many problems, especially regarding the bankruptcy estate. One of them is when a criminal case intersects with a bankruptcy case, as a result of which criminal confiscation is carried out against bankruptcy confiscation in general. In fact, the bankruptcy estate has previously been pledged with a mortgage to the creditor. Then the fulfillment of the rights of creditors holding mortgage rights is disrupted due to the placement of confiscation on the same object by the Police or the Prosecutor's Office.

This study aims to determine the legal protection and analyze the legal position of the bankruptcy estate's mortgage creditors against the confiscation of criminal cases preceding the general bankruptcy confiscation.

This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The type of data used is qualitative data with secondary data sources. The data collection method is carried out by literature study and interviews to clarify and ensure the truth of secondary data and as a complement which is then analyzed using qualitative analysis methods.

The results showed that the legal position of the creditor holding the mortgage is weak in the sense that it does not have a guarantee of legal certainty when executing the bankruptcy estate with the confiscation of a criminal case, which then no party will be able to execute the object of the mortgage until the issuance of a decision that has permanent legal force. If the object of the mortgage right meets the criteria in Article 39 paragraph (1) letter a or letter e of the Criminal Procedure Code, the creditor holding the mortgage right loses its executorial rights and turns into a concurrent creditor. The fulfillment of the execution rights of creditors holding mortgage rights in bankruptcy cases has been protected by Article 21 of Law Number 4 of 1996 and Article 55 of Law Number 37 of 2004.

Keywords : Insolvency, Liability, Legal Standing.